

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Jumlah populasi tidak memiliki pengaruh terhadap bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi di Pulau Jawa menawarkan cara akses dan pengungkapan informasi di situs open government.
2. Kepadatan penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi di Pulau Jawa menawarkan cara akses dan pengungkapan informasi di situs open government.
3. PDRB per kapita tidak memiliki pengaruh terhadap bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi di Pulau Jawa menawarkan cara akses dan pengungkapan informasi di situs open government.
4. Pajak yang dibayar masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi di Pulau Jawa menawarkan cara akses di situs open government. Akan tetapi, pajak yang dibayar masyarakat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi di situs open government.
5. Fragmentasi politik memiliki pengaruh negatif terhadap bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi di Pulau Jawa menawarkan cara akses di situs open government. Akan tetapi,

fragmentasi politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi di situs open government.

6. Stabilitas politik tidak memiliki pengaruh terhadap bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi di Pulau Jawa menawarkan cara akses dan pengungkapan informasi di situs open government.
7. *Smart city* tidak memiliki pengaruh terhadap bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi di Pulau Jawa menawarkan cara akses dan pengungkapan informasi di situs open government.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan salah satu landasan dalam pengambilan keputusan atau perbaikan untuk penelitian yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah, penulis menyarankan untuk lebih bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan praktik *open government* ini dengan menyediakan akses website *open government* dengan lebih mudah serta mengunggah lebih banyak informasi publik didalamnya sebagai bentuk perwujudan dari akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap masyarakatnya.
2. Untuk masyarakat, penulis menyarankan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan hak mendapatkan informasi publik untuk mendukung implikasi dari prinsip-prinsip dalam kebijakan *Open Government* yang meliputi keterlibatan publik, transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk menambah sampel sehingga penelitian tidak hanya berfokus di Pulau Jawa saja tetapi di seluruh Indonesia. Selanjutnya, peneliti diharapkan menambah variabel-

variabel lain yang lebih dapat memberi pengaruh signifikan terhadap inisiatif *open government*.

5.3 Keterbatasan dan Implikasi

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian yang hanya fokus dalam lingkup pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa saja sehingga hasil penelitian kurang merepresentasikan keadaan atau implementasi *open government* di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan perihal variabel yang digunakan dalam penelitian ini karena tidak memasukkan faktor sumber daya manusia sebagai salah satu indikator inisiatif *open government* di ruang lingkup pemerintahan Indonesia.

Hasil dalam penelitian ini memberikan gambaran sejauh mana implikasi *open government* di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah untuk lebih meningkatkan fasilitas akses data informasi publik sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pemerintahan terbuka. Dengan demikian, diharapkan implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat dikawal atau dipantau dengan mudah oleh masyarakat sehingga apabila terindikasi kecurangan atau *fraud* didalamnya, maka akan lebih mudah dilaporkan dan diselidiki.